

	News Title : Ada Potensi Penerimaan Negara, Pemerintah Kaji Regulasi Robot Trading	
	Media Name : msn.com	Journalist : Achmad Zulfikar Fazli
	Publish Date : 07 July 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Home	Topic : Robot Trading

Ada Potensi Penerimaan Negara, Pemerintah Kaji Regulasi Robot Trading

4 menit

Jakarta. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ([Bappebti](#)) terus mengkaji regulasi khusus [robot trading](#). Pengaturan khusus ini diharapkan membuat legalitas, operasional, hingga pajak yang diterapkan pada setiap penjualan *robot trading* semakin jelas.

"Ini sedang dikaji, dilihat, dan dipastikan mereka-mereka yang tidak memiliki izin itu sudah pasti akan ditindak," kata Wakil [Menteri Perdagangan](#), Jerry Sambuaga, kepada wartawan, Kamis, 7 Juli 2022.

Menurut dia, izin soal *robot trading* bisa dicek melalui website atau *call center* Bappebti. Bappebti yang berada di bawah Kemendag, kata dia, tengah mengkaji regulasi *robot trading* yang berfokus kepada perlindungan konsumen atau nasabah.

"Regulasinya begini, jadi kalau *robot trading* itu menggunakan aplikasi atau *software* untuk bisa menentukan penjualan. Nah yang dipermasalahkan adalah ketika aplikasinya digunakan untuk penjualan tidak memiliki izin. Nah ini yang menjadi kesalahan dan praktik yang tidak boleh," ujar dia.

Pemerintah juga melihat potensi pendapatan negara dalam aktivitas *robot trading*. Soal penerimaan pajak, kata dia, juga dikaji dalam regulasi yang tengah digodok Bappebti.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, mengungkapkan aturan tentang penggunaan *robot trading* yang aman terus dirumuskan bersama Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti.

"Pada prinsipnya aturan ini dibuat agar penggunaan robot trading lebih mudah diawasi dan aman dalam penggunaannya di investasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)," ujar Tirta, beberapa waktu lalu.

Menurut Tirta, terdapat tiga aspek pendekatan yang digunakan dalam pengaturan *robot trading* di Indonesia.

Pertama, prinsip yang harus dipenuhi robot *trading* dalam kegiatan PBK adalah robot trading sebagai alat bantu para nasabah. Itu berarti robot *trading* harus digunakan pada pialang berjangka yang berizin, tidak digunakan sebagai kegiatan ilegal berkedok investasi. Kemudian, ada pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha legal yang menggunakan robot *trading*.

Kedua, perlu ada spesifikasi tertentu pada robot *trading* seperti punya transparansi algoritma, variabel bisa diinput sesuai dengan keinginan nasabah, *bugs free*, serta dikembangkan oleh perusahaan yang punya legalitas dan integritas.

Ketiga, menetapkan aturan mengenai kriteria developer robot *trading* seperti punya legalitas yang dikeluarkan otoritas resmi Indonesia.

Pengelola juga harus menyediakan edukasi sistem trading, memberikan *update* algoritma secara periodik, menyediakan layanan pasca perdagangan, hingga tidak menjanjikan profit konsisten.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi VI Herman Khaeron meminta Bappebti lebih gencar memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa dimasuki masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik.

"Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan," tutur Herman Khaeron.

Herman mendorong Bappebti profesional dan melekat teknologi seiring perkembangan zaman. "Kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital," ucap dia.